

GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

Remove Watermark Now

Nama SKPD : Badan Keuangan
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No 27 - 29 Bukittinggi
Tahun Anggaran : 2021

Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota

Tujuan Program : Meningkatkan efektifitas penyusunan rencana kerja program yang tepat sasaran melalui peningkatan pemahaman PUG dan PPRG bagi pengambil keputusan dan penyusun perencanaan serta semua pegawai untuk disebarluaskan dan ditetapkan pada kebijakan dan program

Capaian Program : 50% pelaksana teknis kegiatan mengintegrasikan gender dalam perencanaan penganggaran program kegiatan

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Tujuan Kegiatan : Meningkatnya jumlah pelaksana teknis kegiatan yang mengintegrasikan PPRG dalam perencanaan dan penggarannya

Kode Rekening Kegiatan : 5.02.01.2.01.01

Analisis Situasi : Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD dan penyusunan kebijakn program dan kegiatan pembangunan responsif gender dilakukan melalui analisis gender.

Dalam melakukan analisis gender dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (Gender Analysis Pathway) atau metode analisis lain dimana hasil analisis gender dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS)

Hasil analisis yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari dengan dokumen RKA SKPD

Dalam upaya untuk memastikan bahwa pelaksana teknis kegiatan mengintegrasikan perspektif gender, maka sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota penting untuk dilakukan

Data Umum

Jumlah PNS Badan Keuangan 67 Orang dan jumlah pelaksana teknis kegiatan sebanyak 15 orang, sedangkan jumlah pejabat eselon Badan Keuangan sebanyak 23 orang
Dari semua PNS Badan Keuangan hanya 5 orang yang pernah mengikuti sosialisasi PUG, sedangkan pelaksana teknis kegiatan yang paham gender hanya 2 orang

Akses

Laki-laki mendominasi akses karena jumlah pejabat eselon laki-laki lebih banyak

Partisipasi

Jumlah PNS pada Badan Keuangan

No.	Uraian	L	P	Jumlah
1	Jumlah PNS	35	32	67
2	Jumlah pejabat eselon	12	10	22

3	Jumlah Pelaksana Teknis Kegiatan	9	6	15
4	Pernah mengikuti pelatihan gender	3	2	5
5	PPTK Paham gender	1	1	2

Kontrol

Laki-laki lebih banyak menjadi pelaksana teknis kegiatan daripada perempuan

Manfaat

Penyusunan rencana kerja kegiatan diharapkan dapat menyusun rencana penganggaran dengan mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran responsif gender

Berdasarkan kondisi tersebut, maka terjadi permasalahan sebagai berikut:

Akses

Masih rendahnya jumlah pelaksana teknis kegiatan yang mengimplementasikan perencanaan kegiatan responsif gender di lingkungan Badan keuangan karena keterbatasan kemampuan SDM terhadap gender

Partisipasi

- * Belum adanya pelatihan dan pendampingan penyusunan PPRG secara intensif dan optimal
- * Belum adanya komitmen dari SKPD untuk mengintegrasikan gender dalam perencanaan dan penganggarnya

Kontrol

- * Belum adanya *panduan* yang dapat digunakan untuk menyusun rencana kerja program dan kegiatan yang responsif gender
- * Belum optimalnya peran *focal point* PUG di Badan keuangan

Manfaat

Penyusun rencana kerja Badan diharapkan mampu mendorong pelaksana teknis kegiatan menyusun rencana program kegiatan dengan mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran responsif gender

Penyebab Internal antara lain

- 1 Belum adanya regulasi yang memiliki kekuatan hukum sebagai dasar penyusunan PPRG pada SKPD (hanya tersedia surat permintaan pembuatan GAP dan GBS dari P3APPKB)
- 2 Belum adanya panduan sebagai acuan bagi pelaksana teknis kegiatan untuk menyusun RKA-SKPD yang responsif gender
- 3 Belum berfungsinya *focal point* PUG di Badan keuangan

Penyebab Eksternal antara lain

- 1 Belum adanya pendampingan penyusunan PPRG pada setiap SKPD
- 2 Tidak adanya pengawasan dari Inspektorat selaku Tim Pengawas

Perencanaan Kegiatan	Rencana Aksi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
		Tujuan	Meningkatkan efektifitas penyusunan rencana kerja program yang tepat sasaran melalui peningkatan pemahaman PUG dan PPRG bagi pengambil keputusan dan penyusun perencanaan serta semua pegawai untuk disebarluaskan dan ditetapkan pada kebijakan dan program
		Aktivitas	<div><div>1</div><div>Penyusunan panduan penyusunan rencana kegiatan responsif gender</div></div> <div><div>2</div><div>Sosialisasi pada Badan keuangan untuk dapat mengimplementasikan PPRG</div></div> <div><div>3</div><div>Berkoordinasi dengan SKPD <i>driver</i> PUG dan Pengawas untuk memberikan pendampingan penyusunan PPRG pada SKPD</div></div> <div><div>4</div><div>Mengoptimalkan fungsi <i>Focal Point</i> pada Badan keuangan</div></div>
		Sumber daya (Input)	<div><div>Jumlah Dana</div><div>22.039.950,00</div></div> <div><div>Belanja pegawai</div><div>1.890.000</div></div> <div><div>Belanja Barang Pakai Habis</div><div>10.149.950</div></div> <div><div>Belanja Perjalanan Dinas</div><div>10.000.000</div></div> <div><div>Jumlah</div><div>22.039.950</div></div>
		Indikator Output	<div><div>1</div><div>Panduan penyusunan RKA-SKPD yang mempertimbangkan PPRG sebanyak 1 Dokumen</div></div> <div><div>2</div><div>Jumlah PPTK yang melampirkan GAP dan GBS pada RKA kegiatan sebanyak 8 Orang</div></div>
Alokasi Sumber Daya	Dana SDM Sarana Prasarana	Jumlah Dana Jumlah SDM Laptop 1 unit Komputer 1 unit	- 23 L : 12 Orang P : 11 Orang
Dampak/Manfaat (Outcome)	<div><div><u>Rumusan Kinerja</u></div><div>Meningkatnya jumlah pelaksana teknis kegiatan yang mengintegrasikan PPRG dalam perencanaan dan penggarannya</div></div> <div><div><u>Indikator Kinerja</u></div><div>50% pelaksana teknis kegiatan mengintegrasikan gender dalam perencanaan penganggaran program kegiatan</div></div>		

KEPALA BADAN KEUANGAN KOTA BUKITINGGI



GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

Nama SKPD	: Badan Keuangan
Alamat	: Jl. Jenderal Sudirman No 27 - 29 Bukittinggi
Tahun Anggaran	: 2021
Program	: Program Pengelolaan Keuangan Daerah
Tujuan Program	: Meningkatkan pengintegrasian Gender dalam penganggaran SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi
Capaian Program	: 75 Persen SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi sudah mengintegrasikan gender dalam perencanaan penganggaran
Kegiatan	: Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
Tujuan Kegiatan	: Meningkatkan pengintegrasian Gender dalam penganggaran SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi
Kode Rekening Kegiatan	: 5.02.02.2.01.07

Analisis Situasi : Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah menegaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD dan penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan responsif gender dilakukan melalui analisis gender.

Dalam melakukan analisis gender dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (Gender Analysis Pathway) atau metode analisis lain dimana hasil analisis gender dituangkan dalam penyusunan *Gender Budget Statement* (GBS).

Hasil analisis yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari dengan dokumen RKA SKPD. Dalam upaya untuk memastikan bahwa SKPD mengintegrasikan perspektif gender, maka sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD melalui program Pengelolaan Keuangan Daerah penting untuk dilakukan.

Data Umum

Jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi 28 SKPD, dan jumlah SKPD yang diharuskan mengimplementasikan PPRG sebanyak 28 SKPD (100%)

Meskipun demikian jumlah SKPD yang melampirkan GAP dan GBS nya pada RKA SKPD pada saat pembahasan tidak ada

Panduan untuk melaksanakan pembahasan RKA dalam penyusunan Rancangan Perwako tentang Penjabaran APBD Kota Bukittinggi dengan mempertimbangkan pengimplementasian PPRG belum ada

Akses

Hingga saat ini SKPD yang sudah menerapkan gender dalam penyusunan program dan kegiatan SKPD baru sebanyak 10%

Partisipasi

Jumlah PNS yang melaksanakan pembahasan RKA-SKPD

No.	Uraian	L	P	Jumlah
1	Tim Anggaran Pemerintah Daerah	8	2	10
2	Tim Penyusun	7	1	8

3	Kelompok Kerja Pembahasan	10	22	32
4	Pernah mengikuti pelatihan gender	2	10	12
5	Paham gender	2	10	12

Kontrol

Panduan untuk melaksanakan pembahasan RKA dalam penyusunan Rancangan Perwako tentang Penjabaran APBD Kota Bukittinggi dengan mempertimbangkan pengimplementasian PPRG : belum ada

Manfaat

Dengan kondisi tersebut Pembahasan RKA-SKPD diharapkan mampu mendorong SKPD menyusun penganggarannya dengan mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran responsif gender

Berdasarkan kondisi tersebut, maka terjadi permasalahan sebagai berikut:

Akses

Masih rendahnya jumlah SKPD yang mengimplementasikan anggaran responsif gender di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi karena keterbatasan kemampuan SDM pada SKPD tersebut terhadap gender

Partispasi

- * Belum adanya pelatihan dan pendampingan penyusunan PPRG secara intensif dan optimal
- * Belum adanya komitmen dari SKPD untuk mengintegrasikan gender dalam perencanaan dan penganggarannya

Kontrol

- * Belum adanya *tools* yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembahasan RKA-SKPD dalam rangka penyusunan Rancangan Perwako tentang Penjabaran APBD Kota Bukittinggi yang responsif gender
- * Belum optimalnya peran pokja PUG Kota Bukittinggi

Manfaat

Pembahasan RKA-SKPD diharapkan mampu mendorong SKPD menyusun penganggarannya dengan mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran responsif gender

Penyebab Internal antara lain

- 1 Kurangnya pemahaman perencana di jajaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi
- 2 Belum adanya regulasi yang memiliki kekuatan hukum sebagai dasar penyusunan PPRG pada SKPD (hanya tersedia surat permintaan pembuatan GAP dan GBS dari P3APKB)
- 3 Belum adanya *tools* sebagai acuan bagi TAPD dan Tim dalam melakukan pembahasan RKA-SKPD

Penyebab Eksternal antara lain

- 1 Belum adanya pendampingan penyusunan PPRG pada setiap SKPD
- 2 Belum berfungsinya Pokja PUG pada SKPD *driver* PUG maupun pada SKPD teknis
- 3 Tidak adanya pengawasan dari Inspektorat selaku Tim Pengawas

Perencanaan Kegiatan	Rencana Aksi	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD			
		Tujuan	Meningkatkan pengintegrasian Gender dalam penganggaran SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi		
		Aktivitas	<div>1 Penyusunan <i>tools</i> pembahasan RKA-SKPD</div> <div>2 Sosialisasi pada SKPD untuk dapat mengimplementasikan PPRG</div> <div>3 Berkoordinasi dengan SKPD <i>driver</i> PUG dan Pengawas untuk memberikan pendampingan penyusunan PPRG pada SKPD</div> <div>4 Mengusulkan rancangan regulasi penyusunan PPRG pada SKPD dengan menggunakan Surat Edaran Walikota</div>		
		Sumber daya	Jumlah Dana	338.222.000,00	
		(Input)	Belanja Barang Pakai Habis	98.980.000	
			Belanja Jasa Kantor	114.200.000	
			Belanja Perjalanan Dinas	125.042.000	
			Jumlah	338.222.000	
		Indikator Output	<div>1 Panduan Pembahasan RKA-SKPD dengan mempertimbangkan PPRG sebanyak 1 Dokumen</div> <div>2 Jumlah SKPD yang melampirkan GAP dan GBS pada RKA-SKPD sebanyak 28 SKPD</div>		
Alokasi Sumber Daya	Dana	Jumlah Dana	-		
	SDM	Jumlah SDM	50 Orang	L : 19 Orang P : 31 Orang	
	Sarana	Laptop 3 unit			
	Prasarana	Komputer 4 unit			
Dampak/Manfaat (Outcome)	<u>Rumusan Kinerja</u> Meningkatnya jumlah SKPD yang mengintegrasikan dalam perencanaan dan penggarannya <u>Indikator Kinerja</u> 75 Persen SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi sudah mengintegrasikan gender dalam perencanaan penganggaran				

KEPALA BADAN KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI

